

## **Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado)**

*Evaluation of the Statement of Government Accounting Standards Number 02 on the Report on Budget Realization (Study on The Financial and Asset Agency of Manado City Government Area)*

Muhamad R. D. Lompang<sup>1</sup>, Harianto Sabijono<sup>2</sup>, Heince R. N. Wokas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

[E-mail : aldylompang@gmail.com](mailto:aldylompang@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Government accounting standards (SAP) is a standard, a guideline in preparing and presenting financial reports in the government, both central and local governments in order to achieve transparency and accountability. Government accounting standards are regulated in Government Regulation No. 71 of 2010. The Regional Finance and Assets Agency has presented one element of the financial report, namely the budget realization report. The purpose of this study is to determine and evaluate PSAP No. 02 regarding the presentation of the budget realization report prepared by the Manado City BKAD whether or not it is in accordance with Government Regulation no. 71 of 2010 and Permendagri no. 64 of 2013. This study uses a descriptive qualitative method. The results showed that BKAD had implemented the Income, Expenditure, Transfer, Surplus/Deficit and Remaining Over/Under budget financing in one reporting period, financing receipts, financing expenditures, only Foreign Currency Transactions were not applied because BKAD had never transacted in foreign currency. Foreign Money. This is in accordance with SAP regarding the contents of the Budget Realization Report.*

**Keywords** : Evaluation, PSAP number 02, Government Regulation Number 71 of 2010 and Permendagri 64 of 2013

### **ABSTRAK**

Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah standar, pedoman dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan di pemerintahan, baik pusat maupun daerah pemerintah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah standar akuntansi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Si Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menghadirkan salah satu unsur keuangan laporan, yaitu laporan realisasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan mengevaluasi PSAP No. 02 tentang penyajian anggaran laporan realisasi yang disiapkan oleh BKAD Kota Manado apakah itu ada di dalam atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri no. 64 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa BKAD telah melaksanakan Pemasukan, Pengeluaran, Transfer, Surplus/Defisit dan Sisa pembiayaan over/under budget dalam satu periode pelaporan, pembiayaan kwitansi, pengeluaran pembiayaan, hanya Transaksi Mata Uang Asing yang tidak diterapkan karena BKAD tidak pernah bertransaksi dalam mata uang asing. Uang Asing. Hal ini sesuai dengan SAP mengenai isi Realisasi Anggaran Laporan.

Diterima: 21-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 05-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  
p-ISSN: 24072-361X

Kata Kunci : Evaluasi, PSAP nomor 02, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013

## **1. PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Manado telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Walikota Manado Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Manado, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada penelitian ini hanya mengambil Laporan Realisasi Anggaran saja dengan alasan, Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama, laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran, jika dibandingkan dengan Neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan Neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado harus dilakukan evaluasi agar dapat memberi informasi yang penting untuk pengguna anggaran agar dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Sehingga dibutuhkan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengetahui kesesuaian dalam proses Penyajian Laporan Realisasi Anggaran agar Kinerja dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan lebih efektif dan efisien.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teoretis**

#### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

#### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan.**

Menurut Hans (2016:126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi.

#### **2.1.3 Manfaat Laporan Keuangan.**

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan seperti “Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang”.

## **2.2. Konsep Akuntansi.**

transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

### **2.2.1 Konsep Akuntansi Sektor Publik.**

Halim dan Kusufi (2014:97) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

### **2.2.3 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.**

Akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi Lembaga-lembaga nonprofit atau institutional accounting, menghususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: masjid Lembaga amal, Yayasan, rumah sakit, dan Lembaga-lembaga Pendidikan (Sadeli : 2015 : 6).

### **2.2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL.**

Menurut Kieso et al. (2008) basis akuntansi akrual (accrual basis of accounting) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis penelitian.**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui metode kualitatif untuk menganalisis kinerja Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini adalah klasifikasi penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya:

1. Penelitian Deskriptif Penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang menyelidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (Lembaga, seseorang, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi : 2016).
2. Penelitian Kualitatif Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan positivis, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari padageneralisasi (Sugiono : 2014).

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.**

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado, yang beralamat di Jl. Balai Kota No. Tikala adapun waktupenelitian dimulai dari Januari 2020 sampai dengan selesai.

### **3.3 Jenis, sumber, dan metode pengumpulan data.**

#### **3.3.1 Jenis data.**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang memakai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **3.3.2 Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Manado berupa hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang memakai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis AkruaL

yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Manado.

### 3.3.3 Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara (interview), berupa tanya jawab dengan narasumber di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Manado. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan, sehingga hasilnya diharapkan akan sesuai dengan realita yang terjadi tanpa ada penambahan maupun pengurangan dari narasumber.
2. Dokumentasi adalah untuk memperoleh data tentang laporan realisasi anggaran dan program kegiatan yang berjalan. Dokumentasi disini berupa Laporan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Manado.

### 3.3.4 Metode analisis dan Proses Analisis.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk mendiskripsikan keadaan dalam lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Pada penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan PSAP Nomor 02 terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013.

1. Menganalisis kegiatan operasional dan menganalisis data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Menganalisis Penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dikumpulkan. Setelah dianalisis, kemudian diberi kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil penelitian

#### 4.1.1 Penyajian LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2018.

Pemerintah Kota Manado telah memberikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit dan pendanaan LRA, dibandingkan dengan anggaran pada suatu periode anggaran dan juga dengan realisasinya pada periode sebelumnya. Dalam PSAP nomor 02 disebutkan bahwa LRA akan disajikan minimal satu kali dalam satu periode. Demikian pula menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran setahun sekali: CaLK, 2018). Laporan kinerja disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun anggaran, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyampaikan laporan kinerja rumah tangga pada PSAP nomor 02.

#### 4.1.2 Evaluasi Akuntansi Anggaran LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2018.

Dalam PSAP nomor 02 akuntansi anggaran merupakan pengendalian dan pertanggungjawaban manajemen yang digunakan untuk membantu mengelola pendapatan, pengeluaran, transfer dan pendanaan. Dijelaskan oleh Bapak Franklien Senduk SE, ME selaku Kasubbag Laporan, mengatakan bahwa anggaran di BKAD Kota Manado digunakan untuk alat pertanggungjawaban dan bantuan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pada saat pelaksanaan penganggaran dipertahankan, disetujui dan anggaran dialokasikan.

#### 4.1.3 Evaluasi Akuntansi Pendapatan LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2018.

Dalam PSAP nomor 02 LRA mengklasifikasikan pendapatan menurut jenis pendapatannya. Di BKAD Kota Manado, pendapatan merupakan sumber pendapatan APBD yang dirinci sesuai jenisnya, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan pendapatan lain yang sah.

**Table 4.1 Pendapatan**

|                   | Anggaran 2018 %   | Realisasi 2018 %  | %     | Realisasi 2017 %  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| <b>Pendapatan</b> | 1.491.657.914.000 | 1.461.160.058.047 | 97,69 | 1.648.496.788.028 |

Pos-pos pendapatan dijelaskan dasarkan pada jenis pendapatan. Setiap pos pendapatan merujuk

kepada lampiran terkait (Rincian Realisasi APBD berdasarkan objek pendapatan pada masing-masing fungsi, satuan kerja perangkat daerah) Secara umum pendapatan yang diperoleh pemerintah Kota Manado mencapai Rp 1461.160.058.047,00 atau 97,96% dari target anggaran sebesar Rp 491.657.914.000 per 31 Desember, 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 1.648.496.788.028,00, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 187.336.729.981,00 atau sebesar 11,36%.

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Manado TA 2018 dan anggarannya:**

| Pendapatan Daerah      | TA 2018                  |                          |              | TA 2017                  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                        | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %            | Realisasi                |
| Pendapatan PAD         | 340.105.717.000          | 363.177.940.171          | 106,78       | 374.608,722.687          |
| Pendapatan Transfer    | 1.093.254.597.000        | 1.070.371.140.999        | 97,91        | 1.157.574.665.350        |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 58.297.600.000           | 27.610.976.877           | 47,36        | 73.598.566.055           |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.491.657.914.000</b> | <b>1.461.160.058.047</b> | <b>97,69</b> | <b>1.648.496.788.028</b> |

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp1.461.160.058.047,00 atau 97,96% dari target sebesar Rp1.491.657.914.000,00. Jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp187.336.729.981,00 atau turun 11,36%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadapkeseluruhan Pendapatan Daerah sebesar 24,86%.

#### 4.1.4 Evaluasi Akuntansi Belanja LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2018.

PSAP nomor 02 mengatur pengeluaran dicatat pada saat pencairan rekening kas umum negara/daerah. Mengklasifikasikan usaha menurut perincian ekonomi (jenis usaha), organisasi dan fungsinya. Di BKAD Kota Manado, APBD mengelompokkan belanja daerah diadakan belanja langsung dan belanjatidak langsung, yang dijabarkan melalui jenis, pokok materi, dan perinciannya. Biaya kontinjensi dan biaya transfer.

#### 4.1.5 Belanja.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018, Belanja disajikan menurut Jenis Belanja, yaitu:

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tak Terduga

**Tabel 4.3 Belanja**

|         | Anggaran 2018%    | Realisasi 2018%   | %       | Realisasi %       |
|---------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Belanja | 1.803.119.070.460 | 1.544.432.666.902 | 85,65 % | 1.543.878.367.975 |

Penjelasan pos-pos belanja didasarkan pada jenis belanja. Setiap penjelasan pos belanja merujuk kepada lampiran terkait (Rincian Realisasi APBD berdasarkan objek belanja pada masing-masing fungsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah).

**Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah TA 2018**

| Belanja Daerah | TA 2018 | TA 2017 |
|----------------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|

|                     | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | %     | Realisasi         |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Operasi     | 1.396.043.055.460 | 1.253.349.809.230 | 89,78 | 1.157.260.459.879 |
| Belanja Modal       | 403.076.015.000   | 288.819.124.007   | 71,65 | 383.739.949.734   |
| Belanja Tak Terduga | 4.000.000.000     | 2.263.733.665     | 56,59 | 2.877.958.362     |
| Jumlah              | 1.803.119.070.460 | 1.544.432.666.902 | 85,65 | 1.543.878.367.975 |

Belanja Daerah Kota Manado TA 2018 direalisasikan 2018 sebesar Rp.1.544.432.666.902,00 atau 85,65% dari Anggaran Belanja Operasi realisasi sebesar Rp. 1.253.394.809.230,00 atau 89,78% dari anggaran, Belanja Modal realisasi sebesar Rp. 288.819.124.007,00 atau 71,65%, Belanja Tak Terduga realisasi sebesar Rp. 2.263.733.665,00 atau 56,59% dari anggaran dan Transfer realisasi sebesar Rp. 2.113.954.036,00 atau 79,54% dari anggaran.

### 4.3 Pembahasan

**4.3.1 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.** Penyajian adalah suatu pendapatan mengenai pelaporan komponen atau pos pada laporan keuangan supaya hendak dipahami. Laporan realisasi aturan merupakan laporan dalam menyajikan fakta tentang perhitungan atas aplikasi aktivitas yg sudah dianggarkan pada satu tahun aturan baik dalam kelompok pendapatan, belanja, juga pembiayaan. Tujuan laporan realisasi aturan merupakan menyajikan fakta tentang kapasitas merealisasikan pendapatan berdasarkan yang dianggarkan, melakukan aktivitas dari aturan belanja ditetapkan, dan berasal pembiayaan dipakai buat pembagian surplus atau menutup defisit.

**Tabel 4.5 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado TA 2018 dan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran**

| Unsur   | Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan  | Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  | KET    |
|---|---|--|--------|
| Penyajian informasi Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan.         | Laporan Realisasi Anggaran BKAD menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, dan surplus/defisitLRA yang masing-masing di perbandingkan.                                   | Laporan Realisasi Menyajikan sumbe pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode.   | Sesuai |
| Penyajian penerangan nama entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. | Laporan realisasi anggaran BKAD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA belanja, dan surplus/defisit, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode | LRA harus diidentifikasi secara jelas dan diulangi pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut:<br>a. Nama entitas atau sarana identifikasi<br>b. Cakupan entitas pelaporan;<br>c. Periode yang dicakup | Sesuai |

d. Mata uang pelaporan;  
dan Satuan angka  
di gunakan.

**Tabel 4.6 Perbandingan Penerapan Pendapatan-LRA Pemerintah Kota Manado TA 2018 dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran**

| Unsur                              | Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado  | Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 02 Tahun 2010   | KET    |
|------------------------------------|---|---|--------|
| <b>Akuntansi Pendapatan-LRA</b>    |   |   |        |
| Periode Pelaporan                  | Laporan realisasi anggaran dapat disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun  | Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.   | Sesuai |
| Ketepatan Waktu Penyajian.         | Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.   | Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran   | Sesuai |
| Realisasi Anggaran                 | LRA sekurang- kurangnya mencakup berbagai pos-pos:<br>a. Pendapatan<br>b. Belanja<br>c. Transfer<br>d. Surplus/Defisit<br>e. Penerimaan Pembiayaan<br>f. Pengeluaran Pembiayaan<br>g. Pembiayaan Neto<br>h. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | LRA sekurang- kurangnya mencakup berbagai pos-pos:<br>a. Pendapatan<br>b. Belanja<br>c. Transfer<br>d. Surplus/Defisit<br>e. Penerimaan Pembiayaan<br>f. Pengeluaran Pembiayaan<br>g. Pembiayaan Neto<br>h. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | Sesuai |
| Penyelenggaraan Akuntansi Anggaran | Akuntansi anggaran Diselenggarakan harus anggaran yang terdiri pos-pos anggaran dialokasikan  | Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran dasahkan dan dialokasikan   | Sesuai |
| Pengakuan                          | Pengakuan pendapatan LRA Pemerintah Manado yaitu diakui pada saat diterimanya pada Rekening Kas Umum BKAD dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya  | Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan   | Sesuai |
| Pengukuran                         | Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan   | Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan   |        |

|                            |   |  |        |
|----------------------------|---|--|--------|
|                            | azas bruto, yaitu dengan Membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencata jumlah netonya (setelah dikompesasikan dengan pengeluaran). | azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlahnetonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).             | Sesuai |
| Penyajian dan Pengungkapan | Pendapatan LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS                      | Pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan untuk keperluan pengendalian pemerintah pusat dan daerah | Sesuai |

## 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Manado Tahun 2018 secara umum telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, hal ini didukung oleh hasil analisis data yang diperoleh juga telah menyajikan 8 Komponen LRA Berbasis Akrua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang terdiri dari: Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, Transfer-LRA, Surplus/Defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja pada saat diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan", Bandung: Alfabeta
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat .
- Hadari Nawawi. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Gadjah Mada Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Buku. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Buku. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. (2008). Akuntansi Intermediate, Edisi Kedua Belas, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sadeli, L. M. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 09 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.